



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

**KOMISI VIII DPR RI (BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN)**

Tahun Sidang	: 2023-2024
Masa Persidangan	: I
Rapat Ke	: 18
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Dengan	: Menteri Agama RI dan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Senin, 2 Oktober 2023
Waktu	: 10.00 WIB – Selesai.
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI, Gedung Nusantara II lantai 1 Jln. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270
Acara	: Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1444 H/2023 M
Ketua Rapat	: Dr. H. Ashabul Kahfi, M.Ag
Sekretaris Rapat	: Agus Widijatmoko, S.H.
Hadir	: 1. 29 dari 51 Anggota Komisi VIII DPR RI; 2. Menteri Agama RI (Yaqut Cholil Qoumas); 3. Kepala Pelaksana BPKH (Fadlul Imansyah); 4. Jajaran Kementerian Agama RI; 5. Jajaran BPKH.

I. PENDAHULUAN

1. Ketua Rapat membuka Rapat Komisi VIII DPR RI pada pukul 10.50 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi VIII DPR RI, Dr. H. Ashabul Kahfi, M.Ag dengan didampingi oleh para Wakil Ketua Dr. H. Tb. Ace Hasan Syadzily, M.Si dan H. Marwan Dasopang, M.Si, sesuai waktu dan tempat acara tersebut di atas.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Pada Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama RI dan Kepala BPKH dengan agenda **“Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1444 H/2023 M”** dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Komisi VIII DPR RI telah mendengarkan Laporan Keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1444 H/2023 M dengan saldo awal sebesar Rp 19.636.117.347.484,- dan realisasi sebesar Rp 18.684.102.715.834,-
2. Komisi VIII DPR RI meminta Menteri Agama RI untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran kegiatan yang belum dilaksanakan dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 1444 H/2023 M.

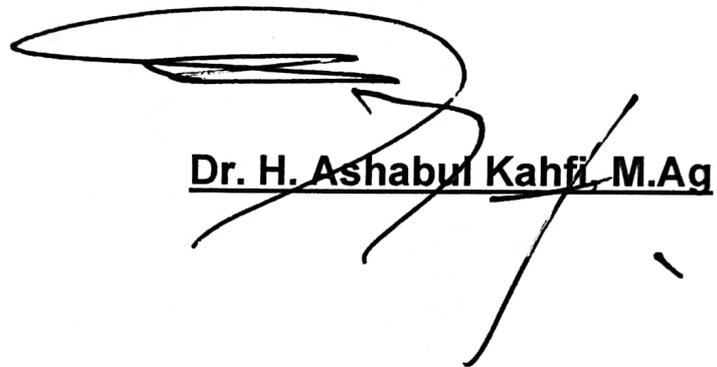
Selanjutnya Komisi VIII DPR RI meminta Menteri Agama RI dan Kepala BPKH untuk menyusun Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1444 H/2023 M secara transparan dan akuntabel untuk mendapatkan persetujuan dari Komisi VIII DPR RI sebelum 30 Oktober 2023.

3. Komisi VIII DPR RI meminta data kuota jamaah haji yang terdaftar di bawah 5 tahun yang diberangkatkan tidak berdasarkan *waiting list* tahun 1444 H/2023 M, baik kuota reguler maupun tambahan.
4. Komisi VIII DPR RI meminta Menteri Agama RI untuk menyegerakan pengiriman tambahan air zamzam bagi jamaah sebanyak 5 liter per jamaah.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 13.40 WIB.

**PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI
KETUA,**



Dr. H. Ashabul Kahfi M.Ag